

# Di Balik Panggung Reforma Agraria : Perjuangan Tersembunyi Perempuan Tani

Pinky Chrysantini

## Abstraksi

*Dalam banyak arena memperjuangkan akses kepada tanah dan pemanfaatannya, perempuan sering dianggap sebagai 'bukan-aktor' yang dianggap tidak perlu ikut campur. Kurangnya peran perempuan petani di arena reforma agraria ini bisa dilihat sebagai pembatasan kultural dari sistem penguasaan tanah yang sangat bertumpu kepada perspektif laki-laki sehingga ruang kelola sumber daya perempuan petani terbatas. Meskipun tidak tampak terlihat sebagai aktor utama di panggung perjuangan itu, perempuan petani sesungguhnya aktif membuat pilihan-pilihan dan keputusan penting dari 'balik panggung' khususnya pengelolaan tanah garapannya. Keikutsertaannya dari balik panggung dilakukannya dengan memunculkan identitas-identitas yang bisa membantunya mewujudkan tujuan, misalnya dengan memunculkan statusnya sebagai perempuan yang ditinggalkan suami tanpa alasan dan harus menopang hidup keluarga. Dengan identitas-identitas itu perempuan-perempuan tani mampu membangun hubungan-hubungan sosial dengan pihak-pihak yang dianggapnya dapat membantunya keluar dari permasalahan dan mewujudkan tujuannya. Penelitian ini dilakukan di Blitar Jawa Timur bulan Maret 2005. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan tani yang menjadi tokoh perjuangan tanah, perempuan yang ditelantarkan secara ekonomi oleh suaminya, dan janda lanjut usia.*

## I. Pendahuluan

Tulisan ini ingin menunjukkan bentuk-bentuk perjuangan perempuan tani menghidupi keluarganya dalam konteks reforma agraria<sup>1</sup> khususnya upaya penataan agraria yang di lokasi penelitian ini dilakukan ditandai dengan berbagai kesimpangsiuran arah dan potensi perpecahan kesatuan warga. Di bawah kondisi semacam itu, para perempuan tani terus melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya dengan memanipulasi identitasnya. Strategi ini harus mereka lakukan karena perempuan tani dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka sedang berada dalam 'dunia' laki-laki, khususnya pengelolaan tanah dan akses kepada informasi maupun sumber daya lainnya, sehingga untuk mendapat akses kepada pengelolaan sumber daya mereka harus mengembangkan siasat.

Citra perempuan sebagai pengurus rumah tangga masih melekat erat kepada mereka, sehingga agar perempuan-perempuan yang menopang ekonomi keluarga ini bisa keluar dari citra itu dan memperoleh akses kepada pengelolaan sumber daya alam khususnya tanah dan input

---

<sup>1</sup> Reforma agraria umumnya dimulai dengan land reform (atau penataan pertanahan).



produksinya, perempuan-perempuan ini harus mampu menampilkan identitas tambahan dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang yang tepat, agar mereka dapat melangsungkan kehidupan keluarganya terutama untuk makan sehari-hari dan menabung untuk masa depan anak-anaknya.

## **II. Beberapa konsep yang digunakan**

Untuk menjelaskan bagaimana perjuangan perempuan di arena agraria yang tidak tampak itu diperlukan beberapa konsep yang dapat membantu kita untuk melihat dan memahami gejala yang dimaksud. Konsep-konsep itu antara lain adalah, (1) reforma agraria atau land reform yang memberikan pemahaman mengenai konteks perjuangan perempuan, (2) batasan simbolik (*symbolic boundaries*) yang memberikan pemahaman mengenai batas-batas simbolik antara laki-laki dan perempuan dalam agraria serta kekuasaan (*power*) yang melekat pada simbol-simbol itu dan (3) identitas dan jejaring sosial yang dipergunakan oleh para aktor, khususnya perempuan untuk melewati batas-batas simbolik itu.

Reforma agraria, atau lebih khususnya *land reform* adalah sebuah perubahan terencana untuk menata kembali tatanan-tatanan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang tidak adil. Pembaruan pertanahan menurut pandangan ini berarti akan mengarah kepada perombakan struktur sosial ekonomi dan politik yang lebih luas (Jacoby, 1971 ; Wiradi, 2000) sehingga intinya terletak pada persoalan kelembagaan (*institutional*). Itu artinya, *land reform* tidak semata-mata membagi-bagikan tanah kepada petani penggarap, namun harus diiringi oleh perbaikan pada tatanan di bidang-bidang (*sphere*) lain. Dalam pandangan ini adalah tindakan yang keliru ketika *land reform* hanya diartikan sebagai pembagian tanah dengan harapan mengentaskan kemiskinan, tapi tetap membiarkan kekuatan pasar yang rakus mendikte kehidupan petani. *Land reform* tidak bisa setengah-setengah, tetapi merupakan sebuah perombakan besar menyangkut perombakan struktur sosial ekonomi politik yang berkait dengan tanah untuk kehidupan petani.

Seringkali *land reform* tidak mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani tak bertanah atau petani penggarap. Tanah-tanah yang sudah diduduki sering diperjualbelikan, sehingga petani kembali tidak punya tanah dan tidak mampu menjadi mandiri. Hal semacam ini juga terjadi di lokasi penelitian ini, di mana sewa menyewa dan jual beli tanah cenderung semakin banyak jadi pilihan warga, terutama karena ada permintaan tebu dari Pabrik gula di sekitar lokasi yang membutuhkan tebu dalam jumlah yang cukup besar. Tanah kemudian dikelola



sesuai kebutuhan pasar, dan bukan lagi menjadi tumpuan petani untuk bisa menentukan kehendaknya sendiri agar lebih mandiri.

Dalam persoalan memperjuangkan tanah perempuan sering dianggap bukan-aktor, artinya dianggap tidak perlu ikut tahu atau ikut campur. Akses perempuan kepada tanah dan pengelolaannya selalu dikaitkan dengan keberadaan suami atau orang tua (warisan bapak). Banyak literatur menggambarkan keadaan yang serupa, yaitu umumnya perempuan baru mendapatkan hak atas tanah lewat warisan ataupun lewat perkawinan (antara lain lihat Hesselting, 1997; Van den Berg, 1997). Bentuk-bentuk perundangan *land reform* (seperti UUPA 1960) yang adapun tidak mengakomodasi secara khusus keberadaan dan kebutuhan perempuan akan tanah karena memang pada umumnya perundangan *land reform* berbasiskan prinsip-prinsip hukum dan bukan dibuat berdasarkan pengguna tanah. Meskipun banyak penelitian dan literatur menunjukkan eratnya kaitan antara wanita dan pengelolaan lingkungan dan juga tanah (antara lain Shiva, 1997 ; Bruijn et. Al, 1997), tapi prioritas perempuan selalu digambarkan berkisar di area rumah tangga khususnya untuk mengurus kesehatan, pendidikan dan keberlanjutan (ketahanan) pangan (Hesselting, 1997). Dengan kata lain, lebih diprioritaskan untuk urusan reproduksi.

Kajian pengelolaan lingkungan oleh perempuan menjadi menarik dan penting khususnya di kalangan perempuan yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga. Bagi beberapa perempuan yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga ini, baik karena tidak lagi hidup bersama pasangannya (janda mati, janda cerai, atau ditinggalkan / ditelantarkan oleh suaminya tanpa kepastian status) maupun perempuan yang suaminya sakit dan menjadi kepala keluarga, mereka memiliki dan mengembangkan cara-cara untuk ‘menyebrang dan masuk’ ke wilayah penguasaan sumber daya alam yang dikuasai laki-laki. Bicara mengenai ‘wilayah penguasaan’, berarti juga bicara mengenai batas, yang dalam hal ini lebih merupakan batas simbolik

Batas-batas simbolik (*symbolic boundaries*) adalah batas di tingkat makna yang digunakan individu atau kelompok untuk membedakan satu entitas sosial dengan entitas sosial lainnya (Brunt, 1992). Batas simbolik mengandung sebuah hubungan relasional. Batas-batas simbolik bisa memperlihatkan batas-batas antara laki-laki dan laki-laki lain tapi juga bisa untuk memperlihatkan batas simbolik antar laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hubungan agraria di dusun ini, batas simbolik laki-laki dari entitas satu dengan batas wilayah simbolik laki-laki lain (*symbolic boundaries between men to men*) juga tampak dalam penelitian ini,



terutama ketika menyangkut penguasaan sumber daya alam dan kekuasaan formal di tangan orang-orang tertentu (laki-laki) dan bagaimana laki-laki dari entitas lain berusaha untuk ‘menyebrang dan masuk’ lingkaran wilayah kekuasaan ini. Tapi untuk makalah ini batas simbolik yang dimaksud atau digunakan adalah batas antara perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan memperoleh akses kepada penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan modal produksi, baik itu tanah, maupun input-input produksi (pupuk, bibit), serta akses kepada pasar dan distribusinya. Semua sumber daya (modal) pertanian ini adalah domain laki-laki. Ketika perempuan ingin atau harus masuk ke dalam dunia itu, para perempuan penopang ekonomi keluarga itu harus ‘menyeberang’ keluar dari entitasnya sebagai perempuan dan mencoba masuk ke wilayah laki-laki. Dengan menyebrang dari batas simbolik ini, perempuan-perempuan ini sedang mengupayakan untuk memperoleh pengakuan dari pemegang modal (atau kekuasaan) bahwa mereka berhak untuk memperoleh, mengelola sumber daya yang sekiranya penting untuk kelangsungan ekonomi rumah tangganya.

Salah satu cara untuk meyakinkan bahwa mereka berhak menguasai dan mengelola sumber daya alam antara lain dengan memunculkan identitas-identitas sosial tertentu. Dalam arena simbolik ini, para perempuan kemudian tidak hanya sekedar menjadi ‘perempuan’ tetapi memunculkan identitasnya sebagai “perempuan dengan tanggung jawab lebih”. Artinya, perempuan-perempuan ini tidak berubah seperti ‘laki-laki’ tapi adalah seorang ibu yang menjalankan peran dan tanggung jawab laki-laki sebagaimana secara sosial budaya disimbolkan sebagai peran dan tanggung jawab laki-laki, seperti mencari nafkah dan melindungi keluarga. Identitas-identitas sebagai “perempuan dengan tanggung jawab lebih” semacam ini kemudian dapat mereka aktifkan untuk membangun jejaring sosial ekonomi dengan pihak-pihak yang dianggapnya dapat membantunya mewujudkan tujuan. Dalam kasus disini, pihak-pihak yang menguasai tanah, modal (produksi) pertanian, penguasaan (informasi) tenaga kerja dan distribusi pertanian, adalah pihak-pihak yang utamanya dicoba untuk diyakinkan oleh para perempuan ini.

### **III. Sedikit tentang Metode dan Tujuan**

Tulisan ini bersumber dari sebuah penelitian mengenai pendudukan tanah di dusun Gambar, Desa Sumber Asri, kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar Jawa Timur, yang dilakukan oleh Akatiga pada bulan Maret – April 2005 yang lalu. Kasus di dalam makalah ini diangkat dari penelitian pendudukan tanah yang lebih umum sifatnya. Kasus yang diambil untuk makalah ini tentu saja tidak mewakili keragaman masyarakat di dusun Gambar, namun ketiga kasus



yang diambil di sini akan mengungkapkan pemahaman yang lebih baik mengenai batas-batas simbolik dibandingkan dengan bentuk-bentuk sampel yang lebih besar. Metode yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perjuangan yang dilakukan oleh perempuan tani adalah dengan wawancara mendalam terutama mengenai sejarah hidupnya dan strategi-strateginya melangsungkan kehidupan rumah tangga dan keluarganya.

Mengungkapkan perjuangan perempuan di dalam sebuah kondisi wilayah yang diwarnai dengan kesimpangsiuran masa depan status tanah dan potensi perpecahan warga ini, diharapkan dapat memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan tani harus menjadi salah satu aspek penting dalam kajian reforma agraria di tingkat konseptual maupun aksi-aksinya. Kaum perempuan tanilah yang pada tingkatan rumah tangga memahami perubahan-perubahan, potensi dan permasalahan yang ada dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam setiap kondisi yang datang kepada mereka. Keberadaan mereka dalam pengelolaan tanah harus diperhitungkan di dalam kajian-kajian reforma agraria maupun aksi-aksi untuk perubahan, terutama untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam makalah ini, ada tiga orang perempuan yang mewakili gambaran kehidupan perempuan di dusun Gambar yang sekaligus adalah informan utama di lapangan. Mereka adalah (1) perempuan tani yang ikut berjuang memperoleh tanah, (2) perempuan tani yang ditinggal pergi oleh suaminya ke kota dan tidak dinafkahi, (3) janda manula. Alasan pemilihan ketiganya sebagai informan utama, adalah karena ketiganya mewakili realitas ruang gerak dan 'panggung' perempuan di dusun Gambar, dengan strategi-strategi yang relatif berbeda namun untuk tujuan yang sama yaitu melangsungkan kehidupan rumah tangga dari kegiatan-kegiatan di dunia pertanian.

#### **IV. Gambaran Penguasaan Tanah dan Penataan Produksinya**

Dusun Gambar berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 825.42 hektar yang sejak zaman kolonial dikuasai oleh perkebunan NV Gambar untuk tanaman kopi dan cengkehnya. Tanah seluas itu, mulanya terdiri dari tanah yang disewa perkebunan NV Gambar dan tanah-tanah hasil pembukaan hutan oleh warga sejak tahun 1947. Jadi di dalam wilayah administrasi dusun Gambar, dahulu adalah tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan NV Gambar, dan ada tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh warga dari hasil pembukaan hutan tahun 1947. Di tahun 1965 tanah-tanah yang dibuka oleh warga itu kemudian dirampas oleh NV Gambar (yang sejak tahun 1957 sudah menjadi perusahaan milik swasta) dengan bantuan



militer. Penderitaan warga sangat berat saat di bawah kekuasaan NV Gambar periode itu (1965-1998). Pada masa kekuasaan kebun, warga selalu hidup dalam ancaman penangkapan jika diketahui kedapatan mengambil cengkeh, kayu-kayu, atau kopi. Upah kuli kontrak juga sangat kecil yang dibayarkan 15 hari sekali. Warga tidak punya otonomi pemerintahan atas wilayah dusun sendiri, melainkan dibentuk dan diarahkan oleh pihak NV Gambar. Tidak ada satu pun warga yang memiliki tanah untuk ditanami, mereka semua hidup dikumpulkan di sebuah wilayah di dusun dan diberi tanah seluas 300 meter untuk rumah non permanen beranyam bambu. Berbagai fasilitas dasar disediakan oleh perkebunan, seperti kamar mandi umum, mesjid, puskesmas, dan sekolah dasar.

Sejak tahun 1998 warga mulai menuntut kembali hak tanah yang dulu dirampas oleh NV Gambar bersama militer sewaktu PKI ditumpas tahun 1965. Tahun 1999, lewat perjuangan yang sangat kompak dan tidak menimbulkan kekerasan, warga dusun Gambar berhasil mendapatkan kembali tanah-tanahnya yang dulu dirampas seluas 212 hektar dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Tanah seperti ini sering disebut oleh aktivis agraria sebagai tanah *reclaim*<sup>2</sup> atau oleh warga setempat disebut tanah redistribusi. Statusnya yang masih HGU itulah yang sekarang sedang diperjuangkan menjadi sertifikat hak milik karena kekhawatiran akan dirampas lagi jika tidak punya sertifikat.

Tanah 212 hektar itu kemudian dibagi-bagi kepada sekitar 543 kk dengan pembagian : (1) 6000 meter untuk kelompok elit dusun yang waktu itu ada di barisan depan perjuangan memperoleh tanah, (2) 4000 meter untuk kepala keluarga tetap yaitu yang sudah lama ada, (3) 2000 meter untuk kepala keluarga yang menumpang kepada kepala keluarga tetap, dan (4) 1000 meter untuk para jompo dan janda. Pembagian semacam ini dilakukan berdasarkan pertimbangan 'semua dapat tanah'. Meskipun luasan yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan tanah yang dulu dimiliki warga, namun seluruh warga menerimanya dengan baik. Bagi mereka kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan hidup di bawah kekuasaan NV Gambar tanpa memiliki tanah. Dan pada pembagian ini pun, kelompok jompo dan janda diberi juga tanah. Hal ini bisa dipandang sebagai sebuah langkah maju untuk menjamin kehidupan manula dan janda. Saat ini, warga sedang mengusahakan tanah redistribusi yang berhasil direbut itu memperoleh sertifikat hak milik yang tersendat-sendat sampai saat ini, kalau tidak bisa disebut berhenti.

---

<sup>2</sup> *Reclaim* adalah sebutan yang populer digunakan oleh aktivis agraria, merujuk kepada tanah yang diambil alih atau diduduki warga. Dalam tulisan ini *reclaim* merujuk kepada tanah yang diambil alih **kembali** karena dulu tanah tersebut memang milik warga yang dirampas oleh penguasa atau pengusaha dan kemudian diambil kembali.



Pembagian tanah ini dimaknai sebagai sebuah kemenangan oleh seluruh warga. Dari tidak memiliki tanah, ramai-ramai semua orang punya tanah. Persoalan muncul kemudian ketika tanah-tanah itu kemudian tidak dikelola sendiri, tapi disewa-sewakan dan ada beberapa yang dijual. Sewa-menyewa dan jual beli tanah ini jelas meruntuhkan semangat reforma agraria yang menghendaki tanah yang direbut harus digarap dan tidak boleh diperjualbelikan. Beberapa orang yang memang tidak pernah bertani, cenderung menyewakan atau menjualnya. Tanah-tanah yang disewa dipakai untuk membeli sepeda motor atau memperbaiki rumah bambu yang usang. Penyewaan dan jual beli tanah ini menjadi semakin populer dilakukan warga karena kebutuhan Pabrik Gula haus akan tanah untuk tebu.

Tebu adalah tanaman utama yang ditanam warga, hampir 90% warga menanam tebu yang diperkenalkan oleh dusun-dusun sekitarnya lewat 2 tokoh dusun sejak tahun 2001. Lambat laun, tanaman-tanaman pangan warga mulai digantikan tebu. Beberapa petani tetap menanam aneka tanaman, terutama buah pepaya, nanas, dan kopi (bekas dari kebun), singkong, talas, selain juga tanaman-tanaman jangka panjang, seperti duren, albasia, dan waru untuk diambil kayunya.

Kini, nyata sekali bahwa tebu adalah tanaman yang semakin banyak menggantikan tanaman-tanaman lama seperti jagung, singkong, kopi dan tanaman berumur panjang lainnya. Dan menanam tebu itu berarti petani masuk ke dalam aturan-aturan main pasar yang dikuasai oleh pabrik-pabrik gula yang bertebaran di Jawa Timur. Iming-iming menanam tebu, meskipun baru bisa dipanen setahun sekali, adalah keuntungan yang diperoleh dari sekali panen, terutama panen kedua dan seterusnya. Petani bersedia tidak memperoleh keuntungan yang dibayangkan karena harus mengembalikan modal penanaman yang tidak murah, kepada para kontraktor<sup>3</sup> tebu. Budidaya tebu yang haus lahan juga mempengaruhi pola penguasaan tanah di dusun Gambar. Semakin banyak warga yang mulai mengakumulasi penguasaan tanah lewat sewa menyewa dan jual beli untuk ditanami tebu, dengan harapan menjadi kontraktor tebu supaya bisa langsung berhubungan dengan Pabrik Gula.

Kebun tebu menyerap tenaga kerja sepanjang tahun. Kehadiran kebun-kebun tebu menjadi tujuan petani-petani yang sudah tidak memiliki tanah lagi untuk bisa bekerja sebagai buruh harian atau borongan mengerjakan perawatan tebu. Laki-laki dan perempuan rata-rata bekerja

---

<sup>3</sup> kontraktor tebu adalah orang (warga, petani) yang menguasai lahan 5 hektar atau lebih, yang menampung tebu dari petani-petani atau menanam sendiri lahannya dengan tebu, yang memiliki kontrak kerja dengan Pabrik Gula sebagai penyeter tebu dengan jumlah minimal 50 ton tebu. Pola kerjanya lebih mirip seperti petani penampung, dan patron untuk para petani berlahan kecil atau buruh tani.



sebagai buruh di kebun-kebun tebu. Tidak ada perbedaan upah diantara keduanya untuk harian yaitu Rp. 7000 sekali kerja dan kelipatannya jika bekerja dua kali. Khusus panen tebu hanya dilakukan oleh laki-laki karena pekerjaan yang berat.

Sejak dilepas tahun 1999, dan sejak diperkenalkannya tebu, tanah menjadi sumber daya yang ramai-ramai hendak dikuasai terutama untuk tanah-tanah di lokasi bekas perkebunan yang sudah terlantar. Beberapa warga yang memang tergolong kaya dan berpengaruh di dalam masyarakat berhasil menguasai tanah-tanah disewakan baik oleh sesama warga maupun juga oleh pihak NV Gambar. Kemampuan mengakumulasi tanah-tanah yang ada ini, meskipun menjadi gunjingan tersendiri tapi dimaklumi oleh warga. Tanah luas yang dikuasai itu hampir pasti dijadikan kebun tebu. Tindakan-tindakan mengusahakan akumulasi tanah ini kemudian ditiru oleh anggota warga lainnya, agar mereka mampu menjadi penyeter tebu ke Pabrik Gula (PG), sehingga semakin banyak yang berlomba-lomba menyewa tanah yang tersedia di hamparan kaki gunung Kelud itu. Lewat para penguasa tanah dan modal penanaman tebu, bergulir jejaring sosial ekonomi di mana para perempuan mencoba untuk ikut serta dalam budidaya tebu.

## **V. Perempuan dan Agraria**

Perempuan dalam wilayah agraria terutama dalam aksi berjuang merebut dan menduduki tanah sering hanya dipandang sebagai pelengkap dan pendukung aksi saja, misalnya menjadi penyedia konsumsi ketika turun aksi ke Kabupaten atau Provinsi, atau penyandang dana. Pada tahap pengelolaan tanah pun para lelaki selalu menganggap bahwa perempuan tidak perlu tahu urusan tanah karena memang bukan urusan mereka. Ungkapan “mereka tidak perlu tahu” atau “ini bukan urusan mereka” adalah ungkapan yang umum dilontarkan ketika ditanya apakah perempuan di dusun diikutsertakan dalam musyawarah soal tanah atau demonstrasi ke kantor pemerintahan. Peran-peran mereka terbatas pada wilayah-wilayah di mana mereka dianggap lebih sesuai yaitu di wilayah domestik.

Hanya ada satu perempuan yang ikut berjuang di ‘depan’ bersama-sama dengan para lelaki dalam kelompok perjuangan *me-reclaim* tanah. Keikutsertaannya disebabkan karena pengetahuannya menenai sejarah kepemilikan tanah yang cukup lengkap, keberaniannya ikut melakukan aksi massal, dan kemampuan artikulasinya menyuarkan ketidakadilan agraria di dusunnya. Ia menjadi simbol perjuangan tanah reclaim yang diakui oleh rekan-rekan laki-laki dan warga serta organisasi-organisasi non pemerintah yang mendampingi proses perebutan





tanah. Pengakuan kepadanya sebagai perempuan yang berjasa untuk memperoleh kembali tanah yang dirampas pabrik, menjadikannya salah satu dari elit desa yang cukup terpendang.

Perempuan-perempuan lain pada umumnya tidak diperhitungkan dalam persoalan pertanian, terutama mengenai keputusan-keputusan penguasaan tanah, keputusan jenis tanaman yang akan dipilih, atau keputusan-keputusan komunal mengenai pengelolaan tanah milik bersama (tanah bengkok dusun) dan upaya mendapatkan sertifikat yang sampai sekarang masih tertunda. Pertemuan-pertemuan warga untuk membicarakan status tanah dari hak guna usaha menjadi hak milik, nyaris tidak pernah melibatkan perempuan di dalamnya. Perempuan-perempuan di dusun itu juga memilih untuk bersikap tidak mau tahu, meskipun mereka memperoleh informasi yang sepotong-sepotong mengenai persoalan tanah yang ada, berikut informasi-informasi mengenai kubu-kubu yang berseteru dalam usaha sertifikasi itu. Saat ini kelompok perjuangan *reclaim* yang lama tidak lagi memegang kewenangan mengupayakan sertifikat karena dianggap sering bertindak melanggar nilai-nilai moral setempat. Sementara kelompok baru yang dibentuk untuk mengurus persoalan status tanah di bawah kepemimpinan kepala dusun, dianggap warga tidak becus dan cenderung disetir oleh pihak Kebun dan Pabrik Gula. Namun tampaknya yang memegang kendali persoalan tanah saat ini di dusun Gambar adalah kelompok kepala dusun dengan pihak pabrik gula dan NV Gambar di belakangnya.

Perempuan-perempuan membutuhkan tanah dan pertanian sama seperti halnya lelaki, untuk terus bisa memberi makan keluarganya. Pada umumnya perempuan-perempuan di Gambar bekerja sebagai buruh di kebun-kebun tebu yang ada. Kegiatan ini dilakukan umumnya oleh perempuan-perempuan yang tanah suaminya atau tanah warisannya sudah terlanjur disewakan atau dijual. Perempuan-perempuan yang masih punya tanah baik dari suami, atau warisan, biasanya mengerjakan tanahnya sendiri dibantu oleh tenaga kerja sewaan jika diperlukan. Kadangkala mereka yang punya tanah, juga memburuh di kebun orang untuk menutupi kebutuhan harian. Hanya perempuan-perempuan yang memiliki anak kecil dan belum sekolah umumnya tidak bekerja. Banyak studi memperlihatkan bahwa meskipun perempuan di desa masuk wilayah produksi, citra peran yang melekat kepada perempuan di desa adalah tetap di wilayah domestik sehingga tetap dianggap bukan aktor utama yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya (lihat Dewayanti, 2003; Firdaus dan Titik, 2003).

Berbeda halnya dengan perempuan-perempuan tanpa pasangan hidup (*spouseless*) atau yang suaminya sakit-sakitan. Perempuan-perempuan ini punya 'tanggung jawab lebih' untuk bisa



menyiasati keadaan tanpa pasangan itu agar anak-anaknya tetap bisa makan, jajan dan sekolah. Mereka ini sesungguhnya aktif mengusahakan ruang kelola ekonomi yang lebih besar daripada ruang yang diciptakan untuk umumnya perempuan dengan pasangan hidup, dengan menciptakan identitas tertentu-tertentu untuk bisa berhubungan ekonomi dengan para lelaki yang menguasai modal (tanah, tenaga kerja, maupun input produksi).

Dibawah ini adalah kasus perempuan-perempuan<sup>4</sup> yang dimaksud, yaitu (1) perempuan tani pejuang pendudukan tanah dengan suami yang sakit-sakitan (2) perempuan yang ditelantarkan secara ekonomi oleh suaminya, (3) janda-mati manula.

### **Mbok Suniyem, satu-satunya perempuan tani pejuang pendudukan tanah.**

Mbok Suniyem (75 tahun) adalah satu-satunya perempuan yang menjadi anggota perwakilan masyarakat yang ikut berjuang di garis depan menuntut kembali tanah rakyat yang dirampas tahun 1965; ikut berdemonstrasi di tingkat kabupaten dan provinsi, ikut bermusyawarah memutuskan persoalan-persoalan tanah. Sebagai seorang perempuan yang diakui memperjuangkan kembali tanah milik masyarakat, Mbok Suniyem kemudian berhak mendapat tanah seluas 6000 m<sup>2</sup> sama seperti rekan-rekan laki-laki lainnya yang jadi anggota perwakilan masyarakat setelah tanah 212 ha berhasil diambil alih kembali oleh masyarakat. Mbok Suniyem bangga dengan perannya untuk mencapai kemenangan mendapatkan kembali hak tanah di tahun 1999, karena dialah yang selalu ‘dipasang’ di depan untuk berorasi mejabarkan penderitaan masyarakat selama 30an tahun tanpa tanah di bawah tekanan kebun NV Gambar. Dengan emosi yang dibarengi dengan air mata, dia selalu dapat membeberkan penderitaannya kepada pejabat-pejabat BPN dan pak Bupati Blitar ketika tanahnya dirampas sampai akhirnya suaminya meninggal 2 tahun kemudian karena tidak kuasa menahan rasa kehilangan tanah 3 hektar 7000 meter persegi yang sudah siap panen dan menuai keuntungan. Dia juga mampu berorasi dengan baik di arena publik tentang serangkaian penderitaan masyarakat yang ditindas dan diancam dengan senjata serta serangkaian penangkapan oleh pihak Perkebunan jika kedapatan mengambil kayu, mengumpulkan kopi atau cengkeh. Kemampuannya ini mengukuhkannya sebagai simbol perjuangan tanah yang dielu-elukan oleh rekan-rekan perjuangannya dan kalangan ornop-ornop yang mendampingi masyarakat.

Pengkukuhannya sebagai tokoh masyarakat untuk memperjuangkan hak tanah masyarakat bukannya tanpa sebab. Sejak muda, ketika Mbok pertama kali datang di dusun Gambar tahun 1949, dia dan suaminya memang dikenal sebagai wanita yang ulet bekeja, hemat, keras hati

---

<sup>4</sup> Nama mereka disamarkan



dan jujur. Suaminya, mbah Karyo (nama samaran) adalah petani, sedangkan Mbok Suniyem sendiri lahir dari keluarga pedagang dan sejak kecil sudah berdagang aneka barang dan makanan. Setelah menikah dan masuk ke dusun Gambar, mereka membuka tanah seluas 3 ha 7000 meter persegi --- sebuah luasan tanah yang saat itu diakui sebagai luas yang besar sehingga membuatnya dianggap sebagai orang kaya dan disegani oleh tetangga-tetangganya. Sementara suaminya bertani, Mbok Suniyem lebih menjalankan perannya sebagai pedagang yang jeli dengan peluang-peluang mendapat untung. Kopi-kopi yang ditanam juga kualitasnya bagus sehingga dia memperoleh rasa 'hormat' dari pengurus kebun. Keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang dan bertani, mereka bisa menghidupi 8 anaknya serta mendirikan warung kelontong dan warung makan di sekitar rumahnya. Warungnya inilah yang kemudian membuatnya menjadi semakin dikenal banyak orang, termasuk pegawai-pegawai perkebunan yang sering berhutang makan dan berhutang barang (rokok, gula, dsb). Termasuk diantara pelanggan warungnya adalah Pak Martono salah seorang sinder perkebunan (sinder adalah jabatan yang cukup tinggi di perkebunan).

Keberanian dan tekad keras Mbok Suniyem teruji lagi ketika tahun 1968, mbah Karyo si suami, tanpa alasan yang jelas dicituk oleh tentara, dituduh terlibat G.30S/PKI. Berita penangkapan suaminya diterimanya ketika dia sedang ada di pasar. Dengan tergesa-gesa Mbok menuju ke kantor perkebunan, tempat warga yang dicituk ditahan sementara untuk kemudian dipindahkan. Dengan berani, dia menghadap tentara penjaga untuk memohon suaminya dilepaskan karena suaminya bukan orang PKI :

*Pak tentara, bojo kulo niku tiyang tani saestu. Kulo sing teng ngarep, bojo kulo niku tani kluthuk, cobi enten mriki niki sampeyan pengaruhipun sinten. Sampeyan taken bojo kulo. Bojo kulo niku ampun ngantos digebuk, sampeyan elus mawon, mengke ngaku piambak*

(Pak tentara, suami saya itu orang tani asli. Sayalah yang ada di depan (untuk urusan ekonomi, maksudnya), suami saya itu petani murni, siapa yang sekiranya mempengaruhi Bapak. Tanya saja kepada suami saya (apakah dia PKI). Suami saya itu jangan sampai digebuk, anda elus saja (punggunnya – diperagakan oleh Mbok) nanti dia pasti akan mengaku sendiri)

Mbok meninggalkan tentara itu, dan sorenya, Mbah Karyo dilepaskan. Adalah pengaruh seseorang bernama Sukro yang menjanjikan kepada Mbah Karyo untuk bisa mendapatkan kembali tanahnya yang dirampas jika bisa membayar sejumlah 1 ringgit uang dan sekilo jagung. Dari desas-desus memiliki tanah inilah mbah Karyo dituduh sebagai PKI, dan kemudian dicituk. Salah satu tentara yang bernama Slamet kemudian malah menjadi teman baik mereka. Mbah Karyo kemudian meninggal tahun 1970, yang menurut mbok Suniyem



suaminya meninggal karena terlalu kecewa kehilangan lahan di mana semua tanamannya yang subur dan akan panen dengan sangat baik itu ditebang semua.

Melalui hubungan baiknya dengan Pak Martono, sinder kebun, Mbok Suniyem diperbolehkan untuk tetap memiliki warung ketika dia harus kehilangan tanah dan harus pindah dari rumahnya tahun 1970 ketika suaminya meninggal. Ini yang dia katakan kepada Pak Martono di tahun 1970 sepeninggal suaminya agar ia dapat mempertahankan warung untuk hidupnya :

*Pak, kulo niki rondo mboten duwe. Anak kulo wolu, tegal kulo sampun dirampas. Kulo nyuwun warung niki ampun dipun tutup. Sedaya pegawai kebun sampun dahar mriki, sedaya sampun tumbas, nggih saget ngutang. Kulo nyuwun ampun ditutup.*

(Pak, saya ini janda yang tidak punya. Anak saya delapan, kebun saya sudah diambil. Saya mohon warung ini jangan ditutup. Semua pegawai kebun pernah makan dan beli barang di warung ini, juga boleh berhutang dulu. Saya mohon jangan ditutup)

Mbok Suniyem menikah lagi dengan suaminya yang sekarang dan berhasil mempertahankan warungnya sampai tahun 78 ketika warungnya mulai tidak laku karena menurutnya di'kerjai' orang (maksudnya lewat dukun). Dari sini, tanpa warung dan tanpa tanah yang bisa digarap dia tidak menyerah, dan terus berdagang keliling ke wilayah utara, juga menebas kopi dan cengkeh dari daerah-daerah sekitar dusun. Suaminya yang kedua bekerja buruh di Kebun. Sekarang, sedikit-sedikit karena sakit lambung dan paru-parunya, Mbah Karyo tetap mengerjakan tanah redistribusi seluas 6000 meter persegi itu bersama Mbok Suniyem ; setengah ditanami tebu dan setengahnya ditanami aneka tanaman. Mbok Suniyem yang lebih mengambil peran besar dalam memutuskan pengerjaan tanah ini, termasuk memutuskan kepada siapa panen tebunya disetorkan, yaitu kepada salah satu kontraktor tebu di dusun Sumber Sari.

Keberanian Mbok Suniyem, tekad dan kejujurannya, membuat dia dihormati orang-orang. Ini yang membuat rekan-rekan tani pejuang tanah mengajaknya bergabung seketika ada gagasan untuk merebut tanah di tahun 1998. Tanpa bepikir dua kali, ajakan kaum muda ini diterima si Mbok. Alasan yang dia berikan adalah bahwa dia berani mati untuk mendapat tanah, karena kematiannya toh nanti akan terbalas. Dan dia mau membantu perjuangan merebut kembali tanah ini asal perjuangan ini jujur. Jujur artinya adalah betul-betul berdasarkan semua yang telah dilakoni, tidak menyimpang dari sejarah, tidak mengada-ada dari kenyataan yang memang sudah jadi hak masyarakat.



Tekadnya sekarang adalah memperjuangkan tanah 6000 meternya itu mendapat sertifikat, meskipun tidak lagi banyak yang bisa dia lakukan untuk berjuang karena dia merasa anak-anak muda rekan seperjuangannya dulu sudah tidak lagi peduli untuk meneruskan perjuangan, sudah lupa daratan dengan tanah yang diperoleh, dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan tanpa persatuan kelompok perjuangan, dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Kini dalam kekhawatirannya bahwa sewaktu-waktu tanahnya bisa dirampas lagi, dia memilih untuk 'duduk manis dan diam' saja menunggu kiprah kepala dusun yang sekarang untuk memperjuangkan tanah di dusun ini memiliki sertifikat.

### **Ratih, perempuan yang tidak tahu di mana suaminya berada.**

Sudah hampir setengah tahun Ratih (24 tahun) tidak tahu kemana dan kenapa suaminya pergi. Ratih sekarang tinggal bersama ibu dan anak perempuannya berusia 5 tahun, di rumah yang sama sejak dusun masih dikuasai oleh kebun NV Gambar, dengan lantai masih tetap tanah dan dindingnya bambu. Tidak dijelaskan secara detil alasan suaminya pergi. Menurut Ratih suaminya pergi ke Bojonegoro untuk bekerja, tapi sampai saat ini dia hanya menebak-nebak saja di mana tepatnya suaminya berada tanpa tahu harus menghubungi siapa dan tidak pernah juga dia dikabari oleh suaminya. Dia lalu menjadi bahan gunjingan tetangga.

Ratih bukan petani. Setamat Sekolah Dasar dan ketika dia berumur 15 tahun, dia pergi ke Surabaya untuk bekerja, dan berhasil bertahan di kota itu selama 6 tahun. Bertemu dengan suaminya di kota itu dan kemudian mereka menikah dan melahirkan di dusun Gambar. Sejak itu, mereka berdua bolak-balik Surabaya-Blitar (ds. Gambar) untuk jangka waktu yang lebih pendek untuk bekerja kemudian kembali lagi ke dusun. Selama di kampung, Ratih dan suaminya tinggal di rumah orang tua Ratih yaitu di rumah yang sekarang dia tempati. Ayahnya Pak Misnuh yang semasa hidupnya sering minum, dan berjudi, itu kemudian sakit-sakitan dan meninggal pada November 2004. Lewat pak Misnuh ini, Ratih dan ibunya mendapat warisan tanah redistribusi seluas 4000 m<sup>2</sup>. Dan sejak ayahnya sakit dan akhirnya meninggal, Ratih tidak lagi bisa ke Surabaya meskipun ia ingin, karena tidak tega melihat ibunya yang sudah tua itu harus mengolah tanah sendirian. Tapi suatu hari Ratih ingin berhenti bekerja di kebun dan cari kerja yang lebih dia senangi dan tidak terlalu berat seperti di kebun.

Di tanahnya yang 4000 m<sup>2</sup> itu, awalnya ditanami oleh mendiang Pak Misnuh dengan pepaya, ketela dan jagung. Jenis tanaman ini dirasakan Ratih dan ibunya berat perawatannya, terutama karena letak tanah ini jauh dari jalanan utama dusun. Panen pepaya terlalu berat diangkut oleh



tenaga mereka yang terbatas itu, lalu ketela dan jagung untungnya tidak seberapa. Akhirnya diputuskan untuk menggantinya dengan tebu.

Tanpa lelaki di rumah, dengan 3 orang yang harus makan, keputusan untuk mengganti tanaman pepaya menjadi tebu, dilakukan dengan bantuan seorang kontraktor tebu, Pak Margo. Pak Margo adalah teman baik suami Ratih. Mereka dahulu sama-sama pendatang dari Blitar Selatan yang hijrah ke dusun ini karena di daerah asalnya air sulit diperoleh. Pak Margo inilah yang kemudian menjadi 'patron' Ratih dan keluarganya sampai sekarang.

Meskipun terhitung sebagai pendatang dan baru tinggal di dusun Gambar 3 tahun, Pak Margo telah mampu menjadi salah satu kontraktor tebu di dusun itu. Dia dikenal sebagai anak muda yang memang ulet dan pandai membaca peluang sehingga bisa berhasil. Dulu di tempat asalnya dia adalah pedagang mebel. Sebagai seorang kawan lama dari suami Ratih, Pak Margo juga dekat dengan keluarga Ratih. Setelah ayahnya meninggal dan suaminya pergi, Ratih segera menghubungi Pak Margo untuk membantunya memulai menanam tanah 4000 meternya itu dengan tebu. Pak Margo membantunya dengan meminjami modal awal, dan saran-saran mengenai jenis bibit yang akan dipakai sampai kepada panennya, serta membantunya mencarikan tenaga kerja untuk tahap-tahap tertentu penanaman tebu yang memang harus dilakukan oleh laki-laki. Ratih sudah sepenuhnya percaya kepada Pak Margo soal tebu, tanpa Ratih tahu detilnya apakah, misalnya bibit tebu yang ditanamnya baik atau tidak.

Selain membantunya mengurus tebu, Ratih bisa memperoleh informasi lain dari pak Margo, misalnya mengenai sepeda motor yang diidam-idamkan Ratih untuk bisa jadi pedagang sayur keliling. Dari Pak Margo Ratih juga bisa meminjam uang, tanpa bunga. Ratih pun dengan leluasa menceritakan persoalan-persoalan pribadinya ke Pak Margo karena dia menganggap Pak Margo sebagai teman baik suaminya lebih paham persoalan rumah tangganya. Dan tentang statusnya yang ditinggalkan oleh suaminya, Ratih paham betul kehidupannya menjadi bahan gunjingan tapi tidak dia pedulikan. Ini ungkapan campur aduk perasaannya :

*Yang paling penting itu ekonomi mbak. Kalau punya uang mau apa aja bisa, ndak pusing. Aku tahu banyak yang ngrasani soal keadaannku, tapi aku dah ndak peduli, nanti malah kesel. Berat mbak ndak ada suami. Aku udah nggak percaya sama laki-laki. Aku bisa curhat sama pak Margo. Dia paling tahu soal aku, apa-apa aku cerita ke dia. Orangnya bisa dipercaya. Aku sakjane orangnya suka humor, sekarang aku jadi pendiam. Aku lebih senang duk tempate Mbah Pardi (kakeknya) dengerin musik sendirian saja.*



Cita-citanya, adalah dia bisa menutupi hutang-hutangnya dengan baik, bisa menyekolahkan Nindi, anak perempuan semata wayangnya yang sedikit-sedikit sudah diajarinya bahasa Inggris populer, dan beli motor untuk dipakainya berkeliling berdagang sayur (*bakul ethek*). Tanah 4000 meter ini tidak akan disewakannya karena dia tahu keluarganya saat ini hidup dari tanah itu, dan sayang kalau tanah itu dilepas. Sebagian uang hasil panen tebunya kali ini akan dia pakai untuk pergi ke Bojonegoro mencari suaminya.

### **Mbah Jimah, janda manula**

Dalam kajian literatur mengenai janda dan perempuan tanpa pasangan lainnya, perempuan-perempuan ini masuk ke dalam posisi sosial yang spesifik dan tidak sederhana, karena kejadiannya atau kesendiriannya tanpa suami punya citra tersendiri yang dikenakan oleh lingkungan sosial kepadanya (lihat Marianti, 2002). Dari berbagai citra yang melekat kepada janda, salah satu yang penting untuk tulisan ini adalah bagaimana dengan statusnya sebagai janda, terutama janda yang berusia lanjut mendapat dukungan (*support*) dari beberapa pihak. Hampir semua janda manula (di atas 70 tahun) di dusun Gambar, mengolah tanahnya dan hidup sehari-hari dengan bantuan kerabat dekat, terutama anak, cucu, dan menantu, atau orang-orang yang dipercaya.

Mbah Jimah (90 tahun) memperoleh tanah redistribusi seluas 4000 meter dari panitia. Dia memiliki 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Suaminya meninggal tidak lama sesudah tanah satu hektar milik mereka dirampas pihak kebun NV Gambar di tahun 1965. Menurutnya suaminya meninggal karena terlalu sedih dan berat menghidupi keluarga hingga akhirnya sakit dan meninggal beberapa tahun kemudian. Mbah Jimah sejak itu bekerja sebagai buruh di Kebun yang merampas tanahnya. Tahun 1999, dia sebagai janda memperoleh tanah 2000 meter, yang kemudian dia kelola bersama anak laki-lakinya, Giyo, yang sudah menikah itu yang juga mendapat tanah seluas 2000 meter. Dua unit keluarga yang tinggal dalam satu rumah ini kemudian mengurus tanah seluas 4000 meter ditanami jagung dan singkong. Ketika Giyo pergi ke Malaysia sebagai TKI, Mbah Jimah kewalahan mengurus tanah yang hasilnya juga tidak terlalu menguntungkan, dan akhirnya separoh dari tanah itu (2000 meter) dia sewakan untuk 4 tahun, dengan alasan untuk makan.

Tanpa anak laki-lakinya, Mbah Jimah mengolah tanah sendiri sekuat tenaganya, apalagi dia punya penyakit jantung. Selama itu, dia dan anaknya yang perempuan, Ginah, hidup dari uang hasil menyewakan tanah yang 2000 meter. Ginah tidak bisa bekerja tani, dan baru saja bercerai. Bantuan berupa gula dan beras diberikan oleh kerabat dekat dan juga penyewa



tanahnya. Sekarang Ginah dinikahkan lagi dengan lelaki dari dusun sebelah. Menantunya inilah yang sekarang membantunya mengerjakan kebun dan sesekali juga bekerja sebagai buruh *manjing* atau kuli pasir untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Di kebunnya sekarang dia tanami kopi sedikit, jagung, ketela, dan pisang. Semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga panennya juga tidak terlalu menguntungkan. Mbah Jimah meminta anaknya yang sudah pulang dari Malaysia untuk bekerja di kebun. Sehingga di dalam rumah itu, ada menantunya yang bisa kerja buruh kebun atau menjadi kuli pasir dan mendapat Rp. 12000,- sehari, dan ada anak laki-lakinya yang bisa bekerja mengolah tanah dengan lebih intensif dibandingkan dirinya.

Kini Mbah Jimah yang sudah tidak banyak punya tenaga untuk bekerja di kebun, punya 2 tenaga kerja keluarga yang dia dapat sandarkan untuk hidup. Dia berharap kebunnya yang 2000 meter lagi akan segera selesai masa sewanya, dan dia mengharapkan bersama-sama dengan anak laki-lakinya dan mantunya bisa merencanakan pengelolaan tanah yang 4000 meter itu supaya lebih menguntungkan dari sebelumnya. Giyo sebetulnya sudah punya rumah dan tanah sendiri di dusun Beringin (dusun sebelah) tempat istrinya berasal, sehingga tanah 4000 meter itu secara tidak langsung diberikan kepada Mbah Jimah. Untuk kebutuhan sehari-hari Mbah Jimah dan Ginah menghutang di warung untuk barang-barang kebutuhan pokok. Seperti umumnya warga di dusun itu, hutang-hutang dibayarkan sesudah hari gajian buruh tanggal 4 dan tanggal 19.

## **VI. Diskusi Penutup**

Batas-batas simbolik dari ketiga kasus di atas ditunjukkan oleh bagaimana tiga perempuan yang berbeda usia dan berbeda latar belakang persoalan itu berusaha memainkan peran dan tanggung jawab menafkahi keluarganya. Batas-batas simbol di dalam ketiga kasus di atas tampak pada penguasaan tanah dan kegiatan pertanian untuk wilayah laki-laki dan perempuan untuk wilayah domestik. Ketika perempuan-perempuan tanpa pasangan hidup (*spouseless*) itu harus menafkahi hidup keluarganya, mau tidak mau mereka harus ‘menyebrang’ wilayah perempuan dan ‘masuk’ ke dalam wilayah laki-laki. Untuk bisa diterima, mereka memunculkan (secara simbolik maupun verbal) identitas sebagai perempuan yang memainkan peran dan tanggung jawab yang biasanya dilakukan/dimiliki oleh laki-laki.

Proses mencipta atau terciptanya batas-batas simbolik berikut identitas sosialnya antara lain dapat terjadi dengan pemberian label-label kepada individu-individu atau sekelompok orang





oleh lingkungannya (Brunt, 1992). Penciptaan batas simbolik lewat *labelling* semacam ini menyiratkan citra tertentu, kemampuan-kemampuan, juga hak yang bisa diterima. Dalam tiga kasus di atas, Mbok Suniyem dicitrakan sebagai perempuan pejuang yang selain berani, tegas, dan jujur, dia juga dianggap kaya dan punya banyak jejaring sosial ekonomi. Ratih dicitrakan sebagai perempuan muda yang masih kurang berpengalaman hidup yang sengsara lahir dan bathin karena ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas dan tidak dinafkahi. Dengan kondisi ekonominya yang juga tidak sebaik Mbok Suniyem dengan tanggung jawab menghidupi ibu dan anak perempuannya yang berusia 5 tahun, orang-orang di sekitarnya iba sekaligus menggugurkan kehidupannya. Sedangkan Mbah Jimah, sudah diketahui umum adalah janda tua yang selama ini hidup pas-pasan secara ekonomi adalah perempuan yang dicitrakan berhak memperoleh bantuan dan dukungan ekonomi juga moral dari anak mantunya, kerabat dekat dan juga tetangga-tetangga sekitarnya.

Mungkin tidak terlalu tepat jika saat ini dikatakan bahwa Mbak Jimah yang sudah lanjut usia itu menyebrang batas simbolik dan masuk mengambil peran yang biasa dilakukan laki-laki untuk menopang ekonomi keluarganya, karena dia diam di rumah. Namun sejak suaminya meninggal 30an tahun yang lalu, Mbah Jimah mengelola sendiri tanah redistribusi dibantu anak-anaknya dan banyak melakukan keputusan-keputusan ekonomi untuk keluarganya. Sekarangpun dari rumahnya, dia tetap ikut memutuskan apakah tanahnya yang disewakan itu nantinya sesudah selesai masa sewa akan dikerjakan sendiri atau tidak, dan kepada siapa dia meminta pertolongan ekonomi, serta mengatur rencana ke depan atas tanah 4000 meter itu.

Ratih tidak punya persoalan dengan akses kepada tanah, karena dia memiliki tanah warisan ayahnya. Dia juga sebetulnya tidak punya persoalan kepada siapa dia harus meminta pertolongan untuk mengelola tanahnya karena dia akrab dengan pak Margo, kontraktor tebu. Batas simbolik yang melekat padanya lahir karena dia ditelantarkan secara ekonomi oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab dan terpaksa harus menghidupi keluarganya sendiri. Dengan label bahwa dia adalah perempuan yang ditelantarkan (*deserted woman*) ini, banyak yang iba kepadanya dan bantuan dari orang-orang yang cukup penting dapat dia peroleh. Dia juga mengambil peran dengan bekerja sendiri di tanahnya itu dan mampu memperoleh akses kepada modal untuk melangsungkan budidaya tebu dan distribusinya ke Pabrik Gula, lewat pak Margo.

Perjalanan hidup Mbok Suniyem jelas memperlihatkan bahwa dia selalu mengambil peran sebagai tiang ekonomi keluarga dan suaminya ada di 'belakang'. Sejak tanahnya dirampas



tahun 1965, suaminya ditangkap tahun 1968, dan eksistensinya sebagai lambang perjuangan merebut tanah di tahun 1998, Mbok Suniyem sudah bisa dianggap sebagai perempuan yang berhasil ‘menyebrang dan masuk’ ke wilayah laki-laki. Perjalanan ini membuatnya termasuk sebagai salah satu elit dusun, yang diakui juga oleh rekan-rekan laki-laki dan warga secara umum. Namun, dengan persengketaan di antara warga sendiri mengenai pengurusan sertifikat tanah, dan beralihnya kekuasaan dari kelompok lama ke kelompok baru, Mbok Suniyem tidak lagi mampu berbuat banyak untuk memperjuangkan status tanahnya. Dia merasa sudah ‘disingkirkan’ oleh anak-anak muda rekan-rekannya dulu yang mulai lupa daratan dan haus menguasai tanah untuk ditanami tebu. Tapi dengan tanah 6000 meter yang dikuasainya sekarang, dia tetap menunjukkan eksistensinya sebagai ‘*tiyang ngarep*’ (orang depan, secara ekonomi).

Reforma agraria di dusun Gambar ini ditandai dengan (1) semakin banyaknya warga yang bekerja sebagai buruh (*manjing*) di kebun-kebun tebu karena tidak lagi punya tanah sendiri baik karena sudah disewa atau dijual, (2) semakin meluasnya ekspansi Pabrik Gula menyewa tanah-tanah yang ada di dusun melalui tangan para kontraktor tebu. Kedua tanda ini cukup untuk memperlihatkan bahwa rumah tangga petani tidak memiliki kemandirian dan semakin tergantung kepada kekuatan pasar yang kapitalistik.

Ketiga perempuan ini sudah merespon perubahan-perubahan sistem tenurial lokal --- dari perampasan tanah yang kemudian direbut kembali, lalu penguasaan tanah yang diatur sedemikian rupa oleh kelompok elit dusun dan tata produksi yang sangat dikuasai oleh Pabrik Gula --- dengan cara menanggulangnya sendiri. Semuanya dilakukan dengan menciptakan identitas sebagai perempuan yang bertanggung jawab kepada kelangsungan hidup keluarganya, sehingga mereka dapat masuk dan memperoleh pengakuan dari laki-laki di wilayah ekonomi pertanian.

## Referensi

Brunt, Dorien

1992 *Mastering the Struggle: Gender, Actors, and Agrarian Change in a Mexican Ejido*. Amsterdam: CEDLA Publication

Dewayanti, Ratih

2003 “Strategi Adaptasi Perempuan: Persoalan Ekonomi dan Upaya Pengorganisasian”, dalam *Jurnal Analisis Sosial* vol 8. no. 2 Oktober. Bandung: Akatiga



- Firdaus, M dan Titik Hartini  
2003 “Bergerak Menentang “Ketidakadilan”, dalam *Jurnal Analisis Sosial* vol 8. no. 2 Oktober. Bandung: Akatiga
- Jacoby, Erich H.  
1971 *Man and Land: the Essential Revolution*. New York: Alfred A. Knopf
- Hesseling, Gerti  
1997 “Sahelian Women as Partners in Contracts on the Management of Natural Resources”. Dalam: Mirjam de Bruijn, Inneke van Halsema, eds, *Gender and Land Use: Diversity in Environmental Practices..* Amsterdam: Thela Publisher
- Marianti, Ruly  
2002 *Surviving Spouses: Support for Widows in Malang East Java*. Amsterdam: UVA
- Shiva, Vandana  
1998 *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: YOI dan Kopalindo
- Van den Berg, Adri  
1997 “Women Farmers in Pursuit of Land Security: and What about Sustainability? Dalam: Mirjam de Bruijn, Inneke van Halsema, eds, *Gender and Land Use : Diversity in Environmental Practices*. Amsterdam: Thela Publisher
- Wiradi, Gunawan  
2000 *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar

